

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi berpusat terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja serta memperoleh pendapatan yang merata. Salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia adalah jumlah penduduk yang berlimpah yang menimbulkan jumlah tenaga kerja tinggi. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada tidak diimbangi dengan penawaran ketersediaan lapangan kerja sehingga dengan keterbatasan peluang lapangan pekerjaan membuat tenaga kerja Indonesia yang terserap masih terbatas.

Salah satu Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Indonesia. Dalam konsep ekonomi kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis karena dengan semakin bertambahnya penduduk produktif dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun jumlah penduduk yang bertambah tidak selalu diiringi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Perluasan kesempatan kerja hanya dapat dilakukan dengan meluaskan kegiatan ekonomi. Tetapi perluasan kegiatan ekonomi harus diimbangi dengan usaha meningkatkan produktivitas.

Jumlah penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk di enam provinsi di Pulau Jawa mencapai 150,4 juta jiwa atau lebih dari 56% penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk di Pulau Sumatera mencapai 58,46 juta jiwa (21,9%), Pulau Kalimantan 16,23 juta jiwa (6,08%), Bali dan Nusa Tenggara 14,95 juta (5,6%), Pulau Sulawesi 19,56 juta jiwa (7,33%), serta Maluku dan Papua 7,31 juta jiwa (2,74%). Sementara jumlah pengangguran juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlah pengangguran di Pulau Jawa mencapai 5,4% Pulau Sumatera 4.81%, Pulau Kalimantan 4,55% dan Pulau Sulawesi 3,92%. Sentralisasi tenaga kerja tetap berada di pulau Jawa dengan angka sebesar 44.571.944 orang atau 63,38%, Untuk daerah lain masih kalah dengan pulau Jawa, yakni Sumatera hanya sebanyak 12.402.409 atau 17,64%, Sulawesi sebanyak 4.798.830 atau 6,82%, Bali Nusa Tenggara 3.677.578 orang atau 5,23%, Kalimantan sebanyak 3.643.852 atau 5,18%, dan yang terendah yakni Maluku dan Papua sebanyak 1.225.853 atau 1,74%.

Tabel 1. 1
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja Tahun 2018

Pulau	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	Tenaga Kerja
Jawa	150,4	44.571.944
Sumatera	54,46	12.402.409
Kalimantan	16,23	3.643.852
Bali dan Nusa Tenggara	14,95	3.677.573
Sulawesi	19,53	4.798.830
Maluku dan Papua	7,31	1.225.853

Tujuan pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi, maka dari itu pemerintah perlu menaikkan tenaga kerja untuk membantu dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, memperluas angkatan kerja dan mengarahkan pendapatan yang merata yang diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Tujuan utama dari proses pembangunan ekonomi Indonesia ialah meningkatnya ketersediaan serta memperluas distribusi dari berbagai barang kehidupan pokok, naiknya standar hidup (penyediaan lapangan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010).

Ada sahabat yang pernah bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, 4:141, hasan lighoirihi)

Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata,

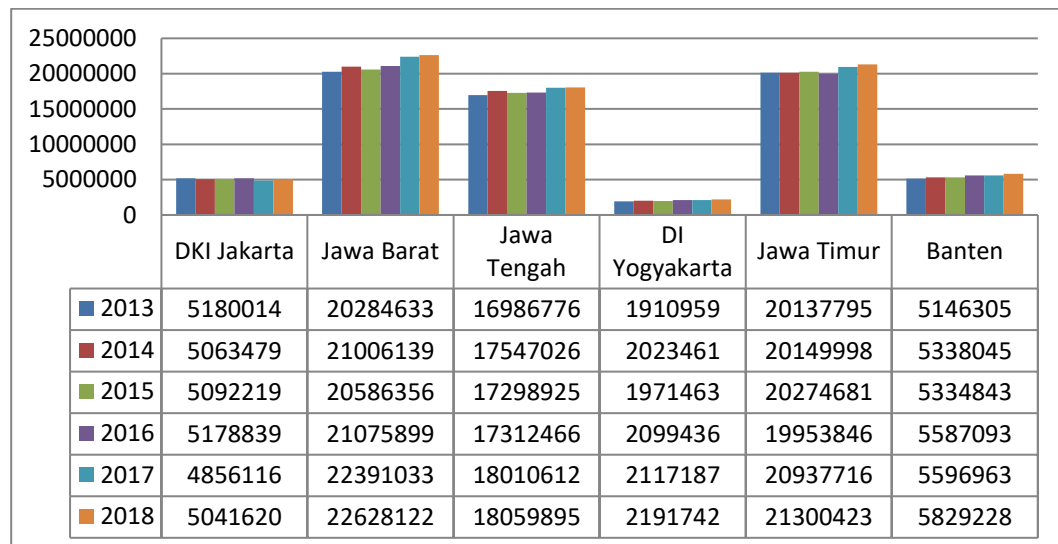
وَالْقَلِيلُ مِنَ الْحَالِلِ يُبَارِكُ فِيهِ وَالْحَرَامُ الْكَثِيرُ يَذْهَبُ وَيَمْحَقُهُ اللَّهُ تَعَالَى

“Rezeki halal walau sedikit, itu lebih berkah daripada rezeki haram yang banyak. Rezeki haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya.” (Majmu’ah Al-Fatawa, 28:646)

Pelajaran yang dapat diambil dari potongan Hadist diatas yaitu bahwa manusia harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mencari rezeki dengan cara yang halal walaupun hanya sedikit karena akan lebih berkah daripada rezeki banyak tetapi haram, maka rezeki yang haram akan hilang dan akan di hancurkan oleh Allah SWT.

Tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan upah. Upah diberikan atas dasar balas jasa dengan memberikan pembayaran finansial dalam bentuk uang kepada pekerja, karena dengan adanya upah yang diterima oleh pekerja membuat pekerja lebih bersemangat pada pekerjaannya karena pekerja tersebut merasa waktu yang pekerja miliki dapat digantikan dengan uang yang diberikan sebagai imbalan dari pengusaha terhadap pekerja. Dengan adanya upah diharapkan mampu menjadi motivasi untuk pekerjaan yang diberikan pada bulan berikutnya, sehingga pekerja mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dengan adanya perjanjian terkait dengan peraturan perundangundangan (Handoko, 1996). Sehingga dapat disimpulkan bahwa upah merupakan pendapatan yang diterima oleh pekerja atas jasa dan waktu yang telah diberikan kepada orang lain atau perusahaan yang diberikan dalam bentuk uang (rupiah) dengan adanya kesepakatan tertentu antara pekerja dan pengusaha pada pengambilan keputusan berdasarkan besarnya upah yang akan diberikan.

Upah minimum dibuat agar dapat mengalokasikan suatu kinerja manusia secara efisien sehingga mampu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari adanya kebijakan mengenai upah minimum memberikan dampak positif terhadap perekonomian yaitu mampu menarik dan memotivasi agar tenaga kerja lebih produktif dalam melakukan pekerjaan karena dengan adanya kebijakan yang berkaitan dengan upah maka sangat diharapkan terjadinya peningkatan atas dasar kinerja yang diberikan oleh tenaga kerja kearah yang lebih positif. Ketika pekerja meningkatkan kinerja kearah yang lebih baik maka hal tersebut dapat mendorong jumlah produktivitas yang dihasilkan oleh tenaga kerja.



Sumber : Badan Pusat Statistika, 2018

Gambar 1. 1
Perbandingan Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja Tahun 2018

Menurut Sonny Sumarsono, (2003) perubahan tingkat upah dapat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya biaya produksi oleh suatu perusahaan. Kenaikan upah juga akan berakibat naiknya harga per unit dari barang produksi, sehingga konsumen akan mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut. Sehingga, akan mengakibatkan tingkat penjualan meurun. Penurunan jumlah produksi suatu barang akan berpengaruh terhadap tenaga kerja yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan tersebut. Menurut Gindling & Terrel, (2004) menyatakan bahwa tingkat upah sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dimana setiap kenaikan 10% upah minimum terjadi penurunan tenaga kerja sebesar 1.09%.

Selain upah, produk domestik bruto dan investasi menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mencegah permasalahan ketenagakerjaan. Faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB akan berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi ketika nilai PDRB naik, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah juga akan naik. Bertambahnya output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan berpengaruh terhadap perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja sehingga produksinya dapat bertambah untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014: 43).

Faktor investasi dapat menambah kapasitas produksi. Naiknya kapasitas produksi takan meningkatkan permintaan faktor produksi, termasuk tenaga kerja. Investasi di Pulau Jawa cenderung mengalami peningkatan. Menurut Akmal, (2010) investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dimana setiap kenaikan investasi sebesar 1% maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,01%.

Selain itu faktor PDRB juga berpengaruh terhadap barang produksi atau sektor disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Faktor PDRB dapat berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan mengalami peningkatan. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi.

Kenaikan nilai PDRB di Pulau Jawa berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan kesesuaian teori dimana menurut Keynes dalam Boediono (1998) bahwa pasar tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Ketika barang yang di produksikan naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa kenaikan output hanya dapat tercapai apabila input (tenaga kerja) di tingkatkan penggunaanya. Permintaan barang dan jasa

dalam suatu perekonomian akan mempengaruhi tingkat output yang harus diproduksi sehingga berdampak pada penggunaan inputnya (tenaga kerja).

Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. (Badan Pusat Statistik, 2008)

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Diantaranya pengaruh variabel terikat penyerapan tenaga kerja dan variabel bebas upah minimum, PDRB, investasi dan inflasi. Maka dari itu, penelitian mengambil judul **“Analisis Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013-2018)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. *Objek penelitian yang digunakan adalah penyerapan tenaga kerja provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018*

2. Penelitian ini adalah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu upah, permintaan pasar akan hasil produksi, harga barang modal, modal, teknologi dan kualitas tenaga kerja, tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi masalah bagaimana pengaruh upah minimum provinsi, produk domestik regional bruto, investasi dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2013-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018?
2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018?
4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenagakerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018.
2. Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018.
3. Menganalisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018.
4. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja Provinsi-provinsi di Pulau Jawa tahun 2013-2018.

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan karena melalui penelitian ini penulis mendapatkan suatu kesempatan yang bermanfaat untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan selama berada di bangku perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memahami kondisi ketenagakerjaan provinsi yang ada di Pulau Jawa, khususnya berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, sehingga diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat untuk mencari pekerjaan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.